

DESAIN KURIKULUM DIPLOMA II OPERASIONALISASI PERPAJAKAN SEKTOR PRIVAT & PUBLIK JALUR CEPAT

¹Ivoletti Merlina Walukow, ²Jerry Sonny Lintong, ³Susy Amelia Marentek, ⁴Alpindos Toweula
^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado
Email correspondence : ivolettiwalukow@gmail.com

Abstrak

Direktur jenderal pendidikan vokasi, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi meningkatkan kompetensi lulusan vokasi dengan melakukan berbagai program, salah satunya yaitu *fast track* pada SMK menuju Diploma 2 (D2) dengan hanya menempuh 1,5 tahun pada jenjang D2. Perubahan kurikulum menjadi dasar untuk meningkatkan keterserapan lulusan pendidikan vokasi. Kurikulum pada pendidikan vokasi tidak boleh terlalu kaku dan tidak boleh terlalu banyak berisi teori. Diharuskan banyak materi terapan yang diajarkan untuk siswa atau mahasiswa vokasi.

Kompetensi merupakan kunci utama bagi para lulusan pendidikan vokasi. Lulusan kompeten adalah mereka yang memiliki bekal *hard skills*, *soft skills*, dan pendidikan karakter yang berguna pada saat mereka terjun langsung dalam dunia usaha dan dunia industri. Pada dua semester akhir program tersebut bakal diisi oleh magang di dunia industri.

Polimdo merupakan salah satu perguruan tinggi, yang harus melaksanakan program tersebut, Oleh karenanya diperlukan usaha yang keras dalam penyusunan kurikulum dengan melibatkan IDUKA, agar *link and super match* dunia Pendidikan dan IDUKA menjadi hal yang prioritas. Bahkan keterlibatan IDUKA bukan hanya sebatas menyusun kurikulum bersama, tetapi diperlukan keterlibatan industri dalam program pembelajaran di kampus.

Kata-kata kunci : Kurikulum, Perpajakan Privat & Publik

Abstract

The director general of vocational education, the ministry of education, culture, research, and technology improves the competence of vocational graduates by conducting various programs, one of which is the fast track in SMK to Diploma 2 (D2) by only taking 1.5 years at the D2 level. Curriculum changes are the basis for increasing the absorption of vocational education graduates. The curriculum in vocational education should not be too rigid and should not contain too much theory. A lot of applied material is required to be taught to vocational students or students.

Competence is the main key for vocational education graduates. Competent graduates are those who have the provision of hard skills, soft skills, and character education that are useful when they are directly involved in the business world and the industrial world. In the final two semesters of the program, internships in the industrial world will be filled.

Polimdo is one of the universities, which must implement the program. Therefore, it takes a lot of effort in preparing the curriculum by involving IDUKA, so that the link and super match of the world of Education and IDUKA becomes a priority. In fact, IDUKA's involvement is not only limited to developing a joint curriculum, but also requires industry involvement in learning programs at campus.

Keywords: Curriculum, Private & Public Taxation

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Program Studi Diploma II Operasionalisasi Perpajakan Sektor Privat & Publik diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/D/HK/2021, tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Diploma Dua pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Politeknik Negeri

Manado merupakan salah satu dari 12 Politeknik yang mendapat penugasan dari Dirjen Diksi untuk melaksanakan program tersebut.

Pendidikan vokasi sekarang ini sedang digarap dengan sangat serius oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan juga Visi Indonesia bahwa pada tahun 2045 negara Indonesia akan menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur (pidato presiden pada peringatan kemerdekaan ke-100 RI 2019). Dan untuk visi tersebut didukung oleh 4 pilar. Keempat pilar itu sebagai berikut : (1) pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK; (2) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (3) pemerataan pembangunan (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK tidak bisa dipisahkan dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menghadapi *megatrend* dunia yang bervariasi yang juga terus berubah. Vokasi sebagai pendidikan yang menitik beratkan pada penguasaan keahlian atau ketrampilan penugasan tertentu menjadi pemegang peran kunci dalam membekali anak bangsa kita untuk bersaing secara global di masa depan. Strategi pembangunan pendidikan khususnya pendidikan vokasi telah dirancang betul – betul untuk mencapai target ini.

Perubahan struktur ekonomi yang terjadi juga harus dijawab pendidikan vokasi dengan mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (IDUKA), mulai dari industri skala besar hingga UMKM. Secara keseluruhan pendidikan vokasi telah menjadi fokus kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program DII Operasionalisasi Perpajakan Sektor Privat & Publik *Fast Track* merupakan salah satu program terobosan pendidikan Vokasi dalam hal ini perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Manado sebagai lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada penguasaan keahlian atau keterampilan penugasan tertentu untuk menjadi pemegang peran kunci dalam membekali anak bangsa kita untuk bersaing secara global di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Belum tersedianya Kurikulum Program Studi Diploma II Operasionalisasi Perpajakan Sektor Privat & Publik jalur cepat (*fast track*) yang berbasis Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB)
2. Belum tersedianya sistem yang memungkintan terjalinnya komunikasi intensif antara Program Studi dan *stakeholder* dalam hal ini industri yang bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Komunikasi ini diperlukan dalam upaya *link and super match* antara industri dan perguruan tinggi vokasi dalam menghasilkan lulusan Diploma II Operasionalisasi Perpajakan Sektor Privat & Publik yang berkualitas, mapan dalam *softskill* dan *hardskill* yang dibutuhkan oleh IDUKA.

2. KAJIAN LITERATUR

Kurikulum tidak hanya sekedar mempelajari mata pelajaran, tetapi lebih mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Ia lebih mempersiapkan peserta didik atau subjek belajar yang baik dalam memecahkan masalah individualnya maupun masalah yang dihadapi oleh lingkungannya. Karena itu kurikulum diberi konotasi sebagai usaha sekolah untuk mempengaruhi anak agar mereka dapat belajar dengan baik didalam kelas, di halaman sekolah, di luar lingkungan sekolah atau semua kegiatan untuk mempengaruhi subjek belajar sehingga menjadi pribadi yang diharapkan. Proses pengembangan kurikulum ialah kebutuhan untuk menspesifikasi peranan-peranan lulusan yang hams

dilaksanakan dalam bidang pekerjaan tertentu, Pada dasarnya kurikulum dirancang dengan maksud mengembangkan siswa agar mampu melaksanakan peranan-peranan itu. Setelah diadakan spesifikasi peranan yang meletakkan batas-batas di sekitar keseluruhan domain dalam kurikulum tertentu, yang memungkinkan dilakukannya identifikasi tugas-tugas spesifik dalam lingkup peranan tersebut.

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sifatnya berkesinambungan. Kurikulum tersebut di desain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi jurang yang memisahkan antara jenjang pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Kata Kurikulum berasal dari bahasa latin "*curriculum*" semula berarti "*a running course. or race course. especially a chariot race course*" yang berarti jalur pacu dan secara tradisional kurikulum disajikan seperti itu (ibarat jalan) bagi kebanyakan orang, terdapat pula dalam bahasa Perancis "*courier*" artinya "*to run*" atau berlari.

Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Seperti halnya dengan istilah-istilah lain yang banyak digunakan, kurikulum juga mengalami perkembangan dan tafsiran yang berbagai ragam. Hampir setiap ahli kurikulum mempunyai rumusan sendiri, walaupun diantara berbagai definisi itu terdapat aspek-aspek persamaan. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dalam perkembangannya kurikulum sebagai suatu kegiatan pendidikan. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian kurikulum yaitu :

Saylor dan Alexander yang dikutip oleh Sagala (2013 : 233) merumuskan kurikulum sebagai "the total effort of the school to going about desired outcomes in school and out of school situations" yaitu kurikulum tidak sekedar mata pelajaran tetapi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Zais (1976) mengemukakan berbagai pengertian kurikulum, yakni: (1) kurikulum sebagai program pelajaran; (2) kurikulum sebagai isi pelajaran; (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan; (4) kurikulum sebagai pengalaman dibawah tanggung jawab sekolah; (5) kurikulum sebagai rencana tertulis untuk dilaksanakan.

Menurut pandangan lama, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Kurikulum lama berorientasi pengalaman masa lampau, tidak berdasarkan suatu filsafat pendidikan yang jelas, mengutamakan perkembangan pengetahuan akademik dan ketrampilan, terpusat pada mata pelajaran, teks book, dan dikembangkan oleh guru secara perorangan. Kurikulum diartikan bersifat luas bukan saja terdiri dari mata pelajaran (*courses*) tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab institusi.

Konsep kurikulum menurut **Tanner & Tanner** yang dikutip oleh Sagala (2013 : 234) yaitu (1) kurikulum sebagai modus mengajar; (2) kurikulum sebagai pengetahuan yang diorganisasikan; (3) kurikulum sebagai arena pengalaman; (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar terbimbing "*all planned learning outcomes for which the school is responsible*", semua rencana hasil belajar (*learning outcomes*) dan kurikulum sebagai hasil belajar merupakan tanggung jawab institusi dan merupakan serangkaian hasil belajar yang diharapkan; (5) kurikulum sebagai suatu rencana kegiatan pembelajaran sudah selayaknyamencakup komponen-komponen kegiatan pembelajaran, namun demikian komponen-komponen kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum masih umum oleh karena itu perlu dielaborasi dan dikaji oleh dosen; dan (6) kurikulum sebagai jalan meraih ijazah merupakan syarat mutlak dalam pendidikan formal.

Berbagai prinsip pengembangan kurikulum menurut KEMENDIKBUD yang dikutip oleh Sagala (2013 252-253), yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. prinsip fleksibilitas. prinsip integritas, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisasi. prinsip objektivitas. prinsip demokrasi dan prinsip praktis. Prinsip relevansi, berarti sesuai

antara komponen tujuan. isi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum. dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Proses penyampaian dan evaluasi.

Prinsip kontinuitas, evaluasi dikembangkan secara berkesinambungan. Prinsip Kontinuitas atau berkesinambungan menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horisontal. Secara vertikal antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikembangkan kurikulumnya secara berkesinambungan tanpa ada jarak di antara keduanya, dan tujuan pembelajaran sampai ke tujuan pendidikan nasional juga berkesinambungan, demikian pula komponen yang lain. Sedangkan berkesinambungan horisontal dapat diartikan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat/kelas yang sama tidak terputus-putus.

Prinsip Fleksibilitas, para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai.

Prinsip berorientasi pada tujuan, tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai; yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan.

Prinsip efisiensi dan efektivitas, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan.

Prinsip keseimbangan, dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangannya terhadap pengembangan pribadi.

Prinsip keterpaduan, dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara mahasiswa dan dosen maupun antara teori dan praktik. Prinsip mutu, pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu dosen, kegiatan belajar mengajar, peralatan/media yang bermutu.

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya qolbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olahraga. Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya (Slamet PH, 2011).

Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan yang mendasar pada pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti: (i) adanya perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) masukan, (2) proses, (3) luaran, dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk

ke dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian, dan karya IPTEKS lainnya, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan. Sistem Pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung oleh kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, yang mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia. Sistem pendidikan tinggi sebagai sebuah proses dapat digambarkan dalam skema di bawah ini (Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Polimdo, 2017).

Sementara itu menurut Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum didefinisikan sebagai berikut.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum (*curriculum plan*) dirupakan dalam bentuk rincian capaian pembelajaran, matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (*actual curriculum*). Pengembangan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak diubah sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama, yaitu kurikulum diletakkan sebagai aspek *input* saja. Namun dengan cara pandang yang lebih luas, kurikulum bisa berperan sebagai : (1) kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofi yang mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) patron atau pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari uraian di atas tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian kurikulum seperti tersebut di atas, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah ***rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran***, sedangkan yang kedua adalah ***cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran***. Kurikulum Politeknik Negeri Manado 2016 disusun berdasarkan kedua dimensi tersebut.

Terkait hal di atas, pengembangan dan penyusunan Kurikulum Politeknik Negeri Manado didasarkan pada rasional berikut.

- (a) adanya tantangan Internal yang menyangkut **kondisi pendidikan tinggi** dewasa ini terkait dengan tuntutan pendidikan tinggi yang mengacu kepada 10 (sepuluh) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Karena itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
- (b) adanya tantangan Eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang menyangkut masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization (WTO)*, *Association of South east Asian Nations (ASEAN) Community*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.
- (c) Paradigma pengelolaan kurikulum Politeknik Negeri Manado 2016 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik (dosen) yang kental kelihatan selama ini, menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (mahasiswa); (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi dosen-mahasiswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif dosen-mahasiswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya); (3) pola pembelajaran ditujukan menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari berbagai sumber yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari dengan pendekatan saintifik; (5) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik dan keterampilan khusus yang diminati oleh peserta didik; dan (7) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*) sehingga prinsip fleksibilitas dapat terjaga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode *focus group discussion (FGD)* dan workshop. Informasi yang dipergunakan dalam FGD dan workshop. FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. FGD pada awalnya digunakan untuk mengetahui citra produk, desain produk, dan sebagainya.

Berikut ini terdapat beberapa karakteristik dari FGD yaitu :

1. FGD diikuti oleh para peserta yang idealnya terdiri dari 7-11 orang, hal ini ditujukan agar setiap individu mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peserta FGD lebih baik berjumlah ganjil karena jika dalam FGD sewaktu-waktu harus mengambil keputusan secara voting dapat mempermudah perhitungan.

2. Peserta FGD terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri homogen. Kesamaan ciri-ciri inti seperti persamaan gender tingkat pendidikan atau persamaan status lainnya.
3. FGD memiliki tujuan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu.
4. Metode FGD biasanya digunakan untuk pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta memberikan jawaban dengan penjelasan-penjelasan.
5. Topik dalam FGD ditentukan terlebih dahulu oleh fasilitator.
6. Waktu yang dibutuhkan untuk FGD berkisar antara 60-90 menit.
7. FGD dilakukan tidak hanya satu kali, biasanya tergantung kebutuhan dilaksanakannya FGD.
8. FGD sebaiknya dilaksanakan di ruang netral disesuaikan dengan pertimbangan bahwa peserta dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya.

Workshop adalah suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut terdapat orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, lalu berkumpul dan membahas permasalahan tertentu dan memberikan pengajaran atau pelatihan kepada para pesertanya. Dengan kata lain, workshop adalah memberikan pengajaran atau pelatihan kepada peserta mengenai teori dan juga praktek pada suatu bidang. Atau bisa diartikan, Workshop adalah pelatihan untuk peserta yang bekerja secara perseorangan atau secara kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan pengalaman.

(Dikutip dari : <https://www.pelajaran.co.id/2017/10/pengertian-workshop-ciri-ciri-jenis-dan-tata-pelaksanaan-workshop.html>)

Jenis dan sumber data terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari stakeholders berupa jawaban-jawaban baik secara lisan maupun tertulis tentang kurikulum Pendidikan Diploma 2 dan melakukan workshop dengan melibatkan 3 pihak yaitu SMK, Polimdo dan IDUKA.
2. Data Sekunder, berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi sekolah dan IDUKA, seperti Struktur Kurikulum SMK, dan profil pekerjaan karyawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan FGD dan Workshop maka Desain Kurikulum Diploma II Operasionalisasi Perpajakan Sektor Privat & Publik Jalur Cepat sebagai berikut :

NO.	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II		III		IV
			RPL		KSA 1	MAGANG I (Privat)	KSA 2	MAGANG II (Publik)
I	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
1	Bahasa Indonesia (SN DIKTI)	2		2				
2	Pancasila (SN DIKTI)	2					2	
3	Pendidikan Agama (SN DIKTI)	2					2	
4	Pendidikan Kewarganegaraan (SN DIKTI-Inklusi Kesadaran Pajak)	2					2	
5	Praktek Bahasa Inggris Bisnis	2		2				

	JUMLAH SKS MPK	10						
II	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
6	Aplikasi Pengolahan Data Bisnis (Lab word, exel, access)	4				2		2
7	Dasar-Dasar Akuntansi	3	3					
8	Akuntansi Keuangan Menengah	3	3					
9	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3		3				
10	Pajak Penghasilan Badan	3		3				
11	Sistem Akuntansi Entitas	2		2				
12	Lab Sisitem Akuntansi Entitas (Peta Bisnis Entitas)	3						3
13	Dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Negara	2	2					
	JUMLAH SKS MKK	23						
III	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
14	Hukum Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan	2		2				
15	Pengantar Hukum Pajak							
16	Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan	2	2					
17	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	2	2					
18	Lab Perpajakan Pemotongan/Pemungutan	3		3				
19	Lab aplikasi e SPT PPh 21	3				3		
20	Lab Perpajakan Sektor Publik	3						3
21	Lab Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan	3				3		
22	Lab Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	3						3
23	Lab Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3				3		
24	Lab Pajak Penghasilan Badan	3				3		
25	Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Bea Meterai	2					2	
26	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2					2	
27	Tugas Akhir	2						2
	JUMLAH SKS MKB	33						
	Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
28	Etika Pengembangan Kepribadian	3		3				
29	Etika Bisnis dan Budaya Organisasi	3						3

	JUMLAH SKS MPB	6						
	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
	JUMLAH SKS MBB	0	12	20	0	14	10	16
	JUMLAH SKS SELURUHNYA	72	12	20	0	14	10	16

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan struktur ekonomi yang terjadi saat ini harus dijawab oleh pendidikan vokasi dengan mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (IDUKA), mulai dari industri skala besar hingga UMKM.
2. Kurikulum merupakan sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program.

6. REFERENSI

- Bogdan, R. dan S. Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2018, SIMLITA BMAS-Dikti. *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi XII Tahun 2018*, simlitabmas.dikti.go.id/
- Harsono, 2015. *Pengantar Problem Based Learning*, edisi kedua, medika, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta
- Politeknik Negeri Manado, 2017. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Polimdo*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017 tentang *Standar Biaya Masukan SBM Penelitian Tahun 2018*.
- Sagala, H. S, 2103. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta
- Slamet PH. 2011. *Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi*. Cakrawala Pendidikan, Juni 2011, Th. XXX, No. 2
- Suderadjat, H, 2014. *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi : Pembaharuan Pendidikan dalam UU Sisdiknas 2003*. Bandung : Cipta Cekas Grafika
- Politeknik Negeri Manado, 2021. *Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Internal*, Edisi 3
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depdiknas

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bandung : Fermana

<https://www.pelajaran.co.id/2017/10/pengertian-workshop-ciri-ciri-jenis-dan-tata-pelaksanaan-workshop.html>)